

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pangandaran, sebagai salah satu objek wisata unggulan di Jawa Barat, memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, UMKM di Pangandaran berpeluang untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM di daerah ini (Sukma & Kuncoro, 2022).

UMKM merupakan stimulus perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan negara Amerika Serikat, tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh UMKM.

Pengelolaan keuangan penting untuk diterapkan pada UMKM. Menurut Falih *et al.* (2019) bisnis UMKM yang keuangannya dikelola secara transparan dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Dampak positif pengelolaan keuangan inilah yang menjadi suatu faktor kunci keberhasilan UMKM dan dapat digunakan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya.

Pangandaran sebagai salah satu objek wisata yang terkenal di Jawa Barat, telah menjadi pusat perekonomian yang signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di sektor pariwisata seperti usaha penginapan, kuliner, cinderamata, dan jasa wisata menjadi bagian integral dari ekonomi lokal. Meskipun potensi pertumbuhannya besar, banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efektif. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM ini adalah literasi keuangan dan inklusi keuangan. Literasi keuangan mencerminkan pemahaman individu atau pelaku usaha terhadap konsep dan produk keuangan yang digunakan dalam operasional bisnisnya. Pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan keuangan, investasi, dan risiko dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengoptimalkan sumber daya keuangannya. Namun, studi menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah, yang menghambat pertumbuhan usaha mereka. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM adalah tingkat literasi keuangan.

Literasi keuangan mengacu pada pemahaman pelaku usaha mengenai konsep dasar keuangan, seperti pencatatan keuangan, perencanaan modal, investasi, serta manajemen risiko. Rendahnya literasi keuangan sering kali menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas, menentukan harga jual yang tepat, serta mengambil keputusan keuangan yang optimal. Akibatnya, banyak UMKM di kawasan wisata yang mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya di tengah persaingan yang semakin ketat (Rifa'i, 2013).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan. Dengan definisi tersebut diharapkan pelaku usaha jasa keuangan, konsumen produk maupun masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami jasa keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan mengubah sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Literasi keuangan yang mengacu pada pemahaman tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan seperti perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pengelolaan utang, dan investasi, sangat berperan dalam menentukan keberhasilan usaha. UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola sumber daya mereka, membuat keputusan bisnis yang lebih bijak, dan menghindari kesalahan finansial yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka (Sanusi, 2021). Literasi keuangan adalah bagian yang lebih penting karena akan meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran (Syamsul *et al.*, 2023), namun ada beberapa penelitian yang lainnya menunjukan

bahwa literasi keuangan tidak memiliki dampak apapun terhadap pertumbuhan UMKM.

Selain itu, inklusi keuangan juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Inklusi keuangan mengacu pada kemudahan akses terhadap layanan keuangan, seperti kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran digital. Akses yang terbatas terhadap layanan keuangan sering kali menjadi kendala bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, terutama dalam mendapatkan pembiayaan guna meningkatkan modal usaha. Program inklusi keuangan yang baik diharapkan dapat membantu UMKM lebih mudah mengakses sumber pembiayaan formal, sehingga mereka dapat berkembang secara lebih optimal. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses keuangan terhadap layanan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan mendeskripsikan integralisasi kajian untuk meminimalkan kendala yang berhubungan dengan penerapan serta pendayagunaan penyediaan produk keuangan serta lembaga keuangan oleh masyarakat (Ismail, 2015).

Menurut Wahyuningtyas (2021) istilah inklusi keuangan merupakan upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan baik berupa harga maupun nonharga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan lembaga keuangan formal. Tujuan keuangan inklusif yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan di sisi lain, berkaitan dengan aksesibilitas terhadap layanan keuangan yang formal, seperti rekening bank, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Akses yang terbatas atau tidak memadai terhadap layanan ini dapat menghambat

kemampuan UMKM untuk berkembang, karena mereka kesulitan dalam mendapatkan modal usaha yang diperlukan untuk ekspansi atau peningkatan kapasitas produksi. Inklusi keuangan yang baik dapat meningkatkan daya saing UMKM, terutama dalam sektor pariwisata yang membutuhkan modal yang cukup besar untuk berinovasi dan memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Selain itu, inklusi keuangan yang masih terbatas juga menjadi kendala bagi UMKM di Pangandaran. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan, seperti kredit usaha, rekening tabungan, atau layanan keuangan digital. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, persyaratan administrasi yang kompleks, dan lokasi geografis yang jauh dari pusat perbankan menjadi penghambat utama dalam peningkatan inklusi keuangan.

Yanti (2019) menyatakan inklusi keuangan mampu meningkatkan kinerja masyarakat dengan cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui peningkatan dan pemerataan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Dengan kata lain ketika akses keuangan mudah maka pembiayaan modal juga mudah didapatkan. Dengan demikian peningkatan kinerja UMKM terwujud yang akhirnya berimplikasi pada laba usaha yang meningkat pula (Inggarwati & Kaudin, 2010). Inklusi keuangan adalah bagian yang lebih penting karena akan meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Melia Kusuma (2021) inklusi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap berkelanjutan usaha dan kinerja pertumbuhan keuangan UMKM, namun ada beberapa penelitian yang lainnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki dampak apapun terhadap pertumbuhan UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting, terutama dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. UMKM yang beroperasi di kawasan wisata, seperti usaha kuliner, penginapan, penyewaan perlengkapan wisata, serta produk kerajinan lokal, tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat tetapi juga menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di objek wisata sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan serta mengakses layanan keuangan yang tersedia. Salah satu daerah wisata yang mengandalkan keberadaan UMKM adalah Pangandaran, yang dikenal sebagai destinasi unggulan di Jawa Barat dengan potensi alam yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. UMKM di kawasan wisata Pangandaran, yang bergerak di sektor kuliner, penginapan, kerajinan tangan, serta jasa wisata, menjadi bagian integral dalam menunjang industri pariwisata lokal. Namun, pertumbuhan UMKM di Pangandaran masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan. Salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan UMKM, mencakup pemahaman tentang perencanaan keuangan, pengelolaan modal, pencatatan keuangan, hingga strategi investasi. Kurangnya pemahaman dalam aspek ini sering kali menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam mengatur arus kas, mengakses sumber pendanaan, serta mengelola risiko usaha mereka (Berdasarkan wawancara dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran).

Seiring dengan berkembangnya teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*), banyak inovasi layanan keuangan yang semakin mempermudah UMKM

dalam mengakses sumber pendanaan dan mengelola keuangan mereka. Namun, rendahnya tingkat literasi keuangan sering kali menyebabkan UMKM belum dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

Di tingkat provinsi, Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui program *One Village One Company (OVOC)*, *UMKM Juara*, dan dukungan pembiayaan berbasis digital. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tantangan masih ada, terutama dalam aspek akses modal, literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 yang menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia berada pada angka 49,68%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun akses keuangan semakin luas, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami cara mengelola keuangan secara efektif.

Kabupaten Pangandaran, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM, khususnya di sektor pariwisata seperti kuliner, penginapan, jasa transportasi, dan cinderamata. Jumlah UMKM di Pangandaran mengalami pertumbuhan signifikan selama 8 tahun terakhir. Berdasarkan data Open Data Jawa Barat dan Dinas Koperasi Pangandaran,

jumlah UMKM meningkat dari 60.293 unit pada tahun 2016 menjadi 98.290 unit pada tahun 2024. Tren ini menggambarkan pertumbuhan yang konsisten, didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Berikut data pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran beberapa tahun terakhir :

Tabel 1. 1
Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran 2016-2024

Tahun	Jumlah UMKM	Sumber	Keterangan
2016	60.293	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2017	64.023	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2018	67.985	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2019	72.191	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2020	76.658	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2021	81.401	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2022	86.437	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2023	91.785	Open Data Jabar	UMKM (Proyeksi)
2024	98.290	Diskop & UMKM Pangandaran	UMKM (Registrasi Dinas, terdaftar)

Sumber: Open Data Jawa Barat, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran

Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, UMKM Pangandaran masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Pertama, banyak pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah, sehingga belum mampu melakukan pencatatan keuangan yang baik, mengelola arus kas, maupun merencanakan investasi jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM sulit bertahan dan mengembangkan usaha. Kedua, inklusi keuangan masih menjadi persoalan utama. Meskipun jumlah lembaga keuangan formal semakin banyak, sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pembiayaan dari sumber informal. Data Dinas Koperasi Pangandaran (2024) mencatat sekitar 30% UMKM yang baru

berdiri dalam dua tahun terakhir gulung tikar akibat keterbatasan akses modal dan lemahnya pengelolaan keuangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, munculnya layanan *financial technology (fintech)* dan digitalisasi perbankan sebenarnya membuka peluang baru bagi UMKM untuk lebih mudah mendapatkan modal usaha. Namun, rendahnya literasi keuangan seringkali membuat pelaku UMKM tidak mampu memanfaatkan peluang ini secara optimal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan: akses keuangan tersedia, tetapi pemahaman keuangan pelaku UMKM masih lemah.

Penelitian terkini menyoroti pentingnya literasi khusus seperti *debt management literacy* dan *budgeting literacy* dalam mendukung akses pembiayaan dan keberlanjutan usaha UMKM, namun kajian empiris di daerah wisata seperti Kabupaten Pangandaran masih sangat terbatas (Farliana et al., 2023; Rahadjeng et al., 2023). Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa sinergi antara literasi keuangan dan modal sosial berkontribusi positif terhadap kinerja UMKM desa wisata, tetapi bukti empiris masih minim.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul adalah bagaimana literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan UMKM di Pangandaran. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM (Mustika, 2020; Kusuma, 2021), namun ada juga penelitian yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan (Syamsul et al., 2023). Hal serupa terjadi pada inklusi keuangan, di mana sebagian penelitian menyatakan adanya pengaruh positif terhadap kinerja UMKM (Yanti, 2019), sementara sebagian lainnya menyatakan

tidak ada pengaruh (Melia, 2021). Hasil yang tidak konsisten ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat menjadi faktor untuk membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan UMKM di Objek Wisata Pangandaran (survei pada UMKM kabupaten Pangandaran)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan di penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi keuangan, inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui literasi keuangan, inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran.

2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran
3. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Sebagai asset Pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan dan informasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Pangandaran dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah di wilayah lainnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan terhitung dari bulan September 2024 sampai 2025 sebagaimana terlampir.